

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki 17.504 pulau dengan area teritori laut, daratan Indonesia seluas 1.913.578 km² dan lautannya seluas 3.273.810 km² (Badan Pusat Statistik, 2016) yang membentang sepanjang khatulistiwa dan terletak di antar abenua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Sarana perhubungan laut menjadi hal yang sangat penting karena untuk menghubungkan antar kota yang satu dengan kota lainnya, serta pulau satu dengan pulau lainnya diperlukan suatu sistem pengangkutan. Semua transportasi laut membutuhkan alat pengangkut yang harus dikelola pemeriksaannya dengan teliti dan teratur agar kapal selalu terjaga keselamatannya selama di laut. Pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan alat transportasi laut dalam hal ini belum optimal dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kecelakaan kapal yang sering terjadi semakin menunjukkan tidak ditaatinya peraturan mengenai pelayaran dalam negeri maupun konvensi pelayaran internasional, terutama UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan konvensi-konvensi dari IMO, oleh perusahaan pelayaran nasional di dalam negeri.

Lalu lintas perkapalan adalah hal yang penting, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu mengamankan agar setiap kecelakaan

kapal yang terjadi dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yaitu Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Peran Lembaga Pemerintahan Perhubungan Laut Syahbandar yang dimaksud Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar Pasal 2 tentang “Kantor Syahbandar mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran” dan Pasal 3 Ayat 1 tentang “Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal sesuai dengan kewenangannya”. Berdasarkan Peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi dalam melaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab Syahbandar dalam mengkoordinasikan pelayanan bidang kelaiklautan kapal seperti pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kepelautan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan harus bertindak tegas atas kelalaian maupun pelanggaran oleh Perusahaan Pelayaran yang tidak mentaati Prosedur Operasional Kapal yang mengacu kepada *Safety of Life at Sea* (SOLAS-1974), *International Safety Management Code* (ISM-Code), dan *International Ship and Port Facility Security Code* (ISPS-Code) yang memberikan panduan dan petunjuk bagi awak kapal dalam pengoperasian kapal sehingga keselamatan, perlindungan lingkungan, keamanan dan kenyamanan awak kapal, barang, serta kapal itu sendiri terjamin. Namun dalam pelaksanaan pelayaran sering kali terjadi kecelakaan dalam berlayar.

Pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan kapal memerlukan penanganan dan pemeriksaan yang efektif dan efisien oleh Syahbandar.

Pemeriksaan kecelakaan kapal yang dimaksud diatas dilakukan untuk mengetahui sebab terjadinya kecelakaan kapal dan/atau menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran atau Awak Kapal. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat ditempuh langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan sebab-sebab kecelakaan kapal yang sama. Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut, sehingga penulis member judul skripsi **“Upaya Peningkatan Keselamatan Pelayaran terhadap Kecelakaan Kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten”**.

Peningkatan keselamatan pelayaran yang tinggi akan memberikan keamanan dan ketertiban terhadap seluruh pihak yang bersangkutan, baik Perusahaan Pelayaran atau PemilikBarang, dan kemajuan terhadap Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan produksi dan produktifitas serta memberikan iklim yang baik dalam menimbulkan stabilitas pelayanan yang prima dalam nasional maupun internasional.

B. Perumusan masalah

Melihat latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dimana sering terjadi kecelakaan kapal sehubungan dengan keselamatan pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten, maka dapat disusun perumusan masalah, yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal di perairan Banten ?
2. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan pelayaran terhadap kecelakaan kapal di perairan Banten ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal di perairan Banten.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan pelayaran terhadap kecelakaan kapal di perairan Banten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai tambahan pengetahuan di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal.
 - b. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca, termasuk instansi terkait dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang dapat berguna untuk peningkatan keselamatan pelayaran terhadap kasus kecelakaan kapal yang terjadi dan menjadikannya sebagai perbaikan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten menjadi lebih baik dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal.
 - b. Sebagai referensi untuk melakukan perbaikan dan koreksi bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten dalam peningkatan keselamatan pelayaran terhadap kecelakaan kapal dan Informasi Prosedur dan Peraturan terhadap Perusahaan Pelayaran dalam menerapkan Standar Keselamatan Pelayaran.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat tata hubungan bagian skripsi yang satu dengan bagian yang lain dalam satu runtutan pikir. Dalam sistematika penulisan ini dicantumkan pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam masing-masing bagian skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah yang akan di bahas, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan judul dari penelitian yang meliputi tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang melandasi judul penelitian, kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan alur yang secara kronologis menjawab pokok permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori atau konsep-konsep, juga hipotesis yang merupakan dugaan sementara yang ditarik dari kerangka pikir atau landasan teori.

Bab III. Metodologi Penelitian

Menguraikan obyek penelitian, tempat dilaksanakan penelitian dengan waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, data yang diperlukan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari temuan penelitian, hasil pengolahan data-data dan teori yang ada, kemudian menganalisa data tersebut sehingga didapat hasil penelitian dan langkah-langkah pemecahan masalahnya.

Bab V. Penutup

Penutup menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka**Lampiran**